

Batola Pertahankan Status WTP



<https://kalsel.antaraneWS.com>

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)¹ atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK RI Perwakilan Kalsel Tahun 2018. Hasil penilaian itu diterima langsung Bupati Batola Hj Noormiliyani AS dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel Tornanda Syaifullah, di Kantor BPK RI Perwakilan Kalsel Jalan A Yani Km 32,5 Banjarbaru, Rabu (22/5).

Laporan Hasil Pemeriksaan diterima Bupati Batola Hj Noormiliyani dan Ketua DPRD H Hikmatullah diserahkan terdiri dari LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2018, LHP atas sistem Pengendalian Intern, dan LPH atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Dari raihan itu, maka Batola telah empat tahun berturut-turut mendapatkan opini WTP masing-masing dua tahun berturut-turut semasa kepemimpinan Noormiliyani bersama Wakil Bupati H Rahmadian Noor dan dua tahun sebelumnya diraih semasa bupati dijabat H Hasanuddin Murad.

Selain Batola, para bupati dan para ketua DPRD kabupaten/kota se-Kalsel juga menerima predikat WTP. Sehari sebelumnya, yakni Selasa (19/5) predikat yang sama juga diraih Pemerintah Provinsi Kalsel. Opini WTP ini langsung diterima Gubernur Kalsel H Sahbirin

Noor.

Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel Tornanda Syaifullah mengatakan, BPK-RI telah melakukan pemeriksaan atas LKPD kabupaten/kota se-Kalsel tahun 2018 sesuai UUD Nomor 15/2004 dan UU Nomor 15/2016. Pemeriksaan yang dilakukan, sebutnya, dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Berdasarkan hasil yang dilakukan BPK sesuai kriteria di atas, maka BPK RI Perwakilan Kalsel menyimpulkan opini atas LKPD tahun 2018 pada pemkab/pemko dan Pemprov Kalsel seluruhnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Tornanda.

Pencapaian opini seluruhnya WTP itu, lanjutnya, mengulang raihan pada tahun 2016 setelah sebelumnya pada tahun 2017 salah satu pemda mendapatkan opini WDP. Meski menyatakan seluruh kabupaten/kota mendapatkan opini WTP tahun 2018, Tornanda menyatakan, BPK Perwakilan Kalsel masih menemukan beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian namun tidak mempengaruhi secara keseluruhan kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan yang tidak mempengaruhi tersebut, jelas dia, diantaranya, pengelolaan kas di bendahara pengeluaran, termasuk pengelolaan kas paa bendahara BOS di sekolah sebelum tertib, pengendalian piutang dan utang belum memadai, penatausahaan dan pengelolaan aset tetap atau barang milik daerah belum tertib. Selanjutnya, terang dia, realisasi belanja tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang tidak dan memadai, kekurangan volume atas pelaksanaan beberapa paket pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda.

Untuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh penerima hibah, terang dia, belum tertib terutama dalam pengelolaan investasi dana bergulir yang tidak memadai dan penyelesaiannya berlarut-larut serta penyusunan anggaran pendapatan dan belanja belum realistis, sehingga di akhir tahun menimbulkan utang belanja. “Atas segala permasalahan di atas sesuai ketentuan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 15/2004 pemkab, pemko dan pemprov wajib menindaklanjuti rekomendasi dlm LHP BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima,” katanya.

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com>, Empat tahun berturut-turut Batola raih WTP, Rabu, 22 Mei 2019.
2. <http://banjarmasin.tribunnews.com>, Batola Pertahankan Status WTP, Senin, 5 Juni 2019.

Catatan:

- Laporan Keuangan Pemerintah terdiri atas dua jenis, yaitu (PSAP Nomor 01):
 1. Laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*);
Laporan pelaksanaan anggaran terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo (SAL)
 2. Laporan financial (*financial report*).
Laporan financial terdiri atas Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sumber: <https://www.scribd.com>

- Menurut SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), opini audit ada 5 macam, yaitu :
 - Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*) – WTP
Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (Modified Unqualified Opinion) – WTP – DPP
Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya.
 - Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) – WDP
Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku

umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

- Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*) – TW

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer of Opinion*) – TMP

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

ⁱ Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.